



Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
<http://ejournal.upg45ntt.ac.id/index.php/ciencias/index>

Penerapan Konseling Lintas Budaya dan Studi Feminis Poskolonial Terhadap Penindasan Budaya Patriarki

(Artikel ini telah dipresentasikan sebagai laporan akhir Penelitian Dosen Pemula DP2M Dikti 2013)

Paula Alfa Loppies^a, Arly E.M. de Haan^b

^aUniversitas Persatuan Guru 1945 NTT, alfaloppies@gmail.com

^bUniversitas Persatuan Guru 1945 NTT, arly_dehaan@yahoo.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 15 Juli 2018

Direvisi: 16 Juli 2018

Disetujui: 17 Juli 2018

Keywords:

Cross-culture counseling,
postcolonial, ex-migrant
workers, patriarchy

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui konteks penindasan dalam budaya patriarki perempuan Timor, mengetahui upaya yang dilakukan oleh perempuan Timor untuk mengatasi penindasan budaya patriarki, dan merancang upaya Konseling Lintas Budaya (*cross-culture counseling*) dalam menjembatani pemahaman yang berbeda antara perempuan Timor (eks tenaga kerja wanita) dan masyarakat setempat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berbentuk studi fenomenologis bersifat deskriptis-analistis. Hasil penelitian menyatakan bahwa isu penindasan perempuan dalam budaya patriarki masyarakat Timor, khususnya di desa Tetaf masih terus terjadi. Hal ini juga yang menjadi alasan bagi beberapa orang perempuan untuk keluar dari desa Tetaf dan menjadi Tenaga Kerja Wanita. Pengalaman menjadi Tenaga Kerja Wanita memberikan perubahan persepsi bagi perempuan Timor namun hal ini tidak mampu mengubah posisi mereka sebagai “yang kedua” ketika mereka kembali ke desa Tetaf. Budaya patriarki tetap menjadi penjajah bagi mereka, karena kembalinya mereka ke Tetaf, pendapat mereka tetap dikuasai oleh laki-laki, bahkan impian mereka untuk menggunakan uang tersebut untuk meningkatkan taraf kehidupan menjadi buyar. Model konseling lintas budaya yang dapat ditawarkan adalah: Konselor, pengenalan dengan konseli, observasi budaya (nilai negatif & positif), menyatukan nilai-nilai yang sejalan, dan menyediakan opsi penyelesaian masalah.

Abstract

The purpose of this research is to know the context of oppression in patriarchal culture of the women of Timor, know the efforts made by the women of East Timor for overcoming the cultural oppression of patriarchy, and designed the cross cultural Counseling efforts (Cross-culture counseling) in bridging the different understanding between women of Timor (ex-migrant workers) and the local community. To achieve that goal then the research method used is the method of qualitative phenomenological studies that are descriptive- analysis. Results of the study stated that the issue of the oppression of women in a patriarchal society culture, particularly in the village of Tetaf still continue to occur. This is also the reason for some women to get out of the village of Tetaf and became migrant workers woman. Experience being ex-migrant workers gives a change of perception for women of Timor, but it is not able to change their position as 'the second' when they returned to the village of Tetaf. Patriarchal culture remained the colonizer for them, since their return to Tetaf, their opinions remain dominated by men, even their dreams to use the money to improve the lives of being dispersed. Cross cultural counseling model that can be offered are: Counselor, client, with the introduction of observation culture (positive to negative values), brings together the values in line, and provides options to problem resolution.

✉ Alamat korespondensi:
Kampus FKIP, Jl. Perintis Kemerdekaan III/40, Kota Kupang
E-mail: fkip.j3p@gmail.com

PENDAHULUAN

Ketidakadilan nampaknya telah menjadi masalah yang ada dan akan tetap ada dalam sepanjang kehidupan manusia, baik itu dalam bidang hukum, ekonomi, politik serta budaya. Sebagai contoh, berbagai kasus korupsi di negeri ini yang tak kunjung terselesaikan, ketimpangan ekonomi, kesenjangan antara kaya dan miskin serta berbagai bentuk ketidakadilan lainnya.

Salah satu bentuk ketidakadilan yang patut diperhatikan adalah budaya patriarki. Budaya patriarki diartikan sebagai sebuah sistem nilai yang menempatkan laki-laki pada tempat yang lebih tinggi dari kaum perempuan (Mies, 1986). Budaya patriarki ini telah menyebabkan perempuan mengalami berbagai ketidakadilan, baik itu marginalisasi, proses pemiskinan ekonomi, subordinasi, *stereotype*, kekerasan dan beban kerja ganda (*double burdens*). Karena itu, tidaklah heran bahwa perempuan yang “menopang separuh langit,” masih merupakan “makhluk setengah manusia.” Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sekjen PBB Boutros Boutros Gali (masa jabatan 1992-1996) dalam pesannya pada Hari Perempuan Internasional tahun 1996 “*tak ada masyarakat yang memperlakukan penduduk perempuan sebaik penduduk laki-laki*.” (Suleeman & Souk, 1997).

Ketidakadilan yang terjadi karena budaya patriarki yang dipahami sebagai budaya penindasan laki-laki terhadap perempuan juga dialami oleh para perempuan Timor yang tinggal di Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana-Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Budaya Timor yang kental dengan patriarki telah membentuk sebuah konstruksi sosial yang memisahkan tugas laki-laki dan perempuan (gender) dalam ritus *na poitan li ana* (membawa anak keluar). Ritus ini menunjukkan bahwa sejak lahir sudah ada perbedaan ranah kerja, laki-laki bekerja di luar dan perempuan dalam rumah. Kejelasan

strukturnya dapat dilihat dibawah ini. Kejelasan strukturnya dapat dilihat dibawah ini (Kolimon, 2008):

Tabel 1. Struktur Sosial

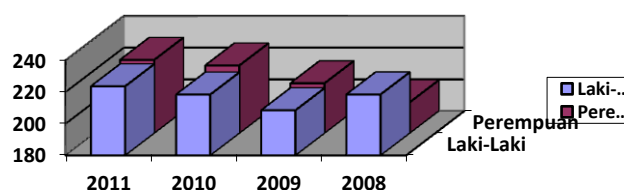
Laki-laki (<i>mone</i>)	Perempuan (<i>feto</i>)
Di luar (<i>mone</i>)	Di dalam (<i>nanan</i>)
Kanan (<i>neu</i>)	Kiri (<i>li</i>)
Atas (<i>fafon</i>)	Bawah (<i>pinan</i>)
Depan (<i>matan</i>)	Belakang (<i>kotin</i>)
Surga (<i>nenon</i>)	Bumi (<i>pah</i>)
Panas (<i>maputu</i>)	Dingin (<i>manikin</i>)

Sumber: Mery Kolimon, *A Theology of Empowerment*, Kampen: Protestant Theological University, 2008, 143-144; 166-167

Dengan melihat struktur yang telah ada diatas, telah terjadi dikotomi antara ranah publik dan domestik, atas dan bawah, surga dan bumi yang menggambarkan laki-laki lebih utama dan perempuan menjadi warga kelas dua. Jelas bahwa perempuan tersubordinasi oleh dominasi laki-laki dan perempuan tidak berhak untuk tampil didepan publik, karena ia selalu berada di belakang. Tetapi, struktur ini tidak mudah untuk diubah karena mereka percaya bahwa pembagian ini menghasilkan keselarasan hidup, jika ada yang bertindak diluar struktur ini akan mengganggu keselarasan hidup mereka, bahkan mengganggu stabilitas hidup komunitas.

Bentuk penindasan ini cukup kuat mengakar dan terjadi setiap tahunnya, walaupun data menunjukkan jumlah penduduk perempuan di TTS mengalami peningkatan dan jumlahnya cukup signifikan.

Gambar 1. Jumlah Penduduk TTS 4 Tahun Terakhir



Sumber: <http://timortengahselatankab.bps.go.id>

Faktor penting yang membuat perempuan Timor makin terpuruk adalah pengutamaan posisi laki-laki dalam pendidikan. Data di bawah ini menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan perempuan Timor.

Tabel 2. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki dan jenis kelamin di kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2011

Ijazah Tertinggi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sekolah Dasar SMP Umum			
SMA	55,81	62,39	59,10
Umum	21,18	19,86	20,52
SMK	17,09	13,04	15,06
	1,58	1,14	1,36
Diploma I/II	0,81	0,78	0,80
Diploma III	0,82	0,83	0,93
Diploma IV/S1	2,55	1,93	2,24
S2 dan S3	0,15	0,03	0,09
Jumlah	100	100	100

Sumber: TTS dalam Angka 2011

Dan karena mereka tidak disertakan dalam pendidikan, maka perempuan selalu dilihat sebagai yang tidak mampu baik secara “otot” maupun “otak.” Karena rendahnya tingkat pendidikan perempuan dan kesulitan ekonomi yang makin kuat maka para perempuan Timor harus bekerja keras. Mereka mulai bekerja sebelum matahari terbit. Mereka mengambil air di sumur, menyiapkan sarapan, mencuci, menyapu rumah dan halaman, memberi makan ternak (ayam, babi, sapi) dan menyiapkan anak-anak untuk sekolah. Setelah itu, mereka harus pergi ke kebun (ladang) untuk menanam kacang atau bawang. Kadang-kadang mereka juga harus ke pasar, yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka untuk menjual hasil

kebun mereka. Sebelum anak-anak kembali dari sekolah, ia harus pulang terlebih dahulu untuk menyiapkan makan siang dan dilanjutkan dengan menenun untuk menambah pemasukan keluarga. Sore hari dipakainya untuk memberi makan ternak, menyiapkan makan malam dan membersihkan rumah. Setelah makan malam, ia harus menenun lagi. Pekerjaan mereka lebih berat dibandingkan dengan laki-laki petani Timor.

Karena beratnya tugas yang harus dijalani, rendahnya tingkat pendidikan dan karena kemiskinan yang dialami, maka banyak diantara para perempuan Timor yang memilih untuk bekerja menjadi seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri. Mengapa menjadi TKW? Ada beberapa hal yang perlu dicatat berkaitan dengan hal ini: *pertama*, krisis ekonomi yang terjadi dan tak kunjung berakhir membuat dorongan untuk menjadi TKW di luar negeri makin tinggi. Tercatat pada tahun 2004, hampir 80% dari seluruh TKI yang dikirim ke luar negeri adalah perempuan, dan 95% dari mereka bekerja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga atau *baby sitter*. Selain itu, terjadi peningkatan permintaan dari negara-negara lain untuk TKW asal Indonesia, hal ini sejalan dengan begitu kompetitif dan sedikitnya peluang untuk bekerja di negeri sendiri, apalagi dengan upah yang minim bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan memadai. Terakhir, begitu banyak perusahaan penyalur tenaga kerja yang dengan gigih mencari peminat. Hal ini termasuk dengan meniadakan syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi oleh calon TKW. Banyak juga dari antara calon TKW yang berhasil masuk karena dibujuk oleh calo (Asia Development Bank, 2006).

Banyak dari mereka yang memilih menjadi pembantu rumah tangga dan *baby sitter*, karena mereka tidak memiliki kemampuan intelektual yang memadai.

Budaya patriarki telah membatasi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mereka hanya belajar secara informal mengenai menjahit, menenun, memasak dan mengurus rumah. Pekerjaan mereka akan menjadi lebih mudah dan lebih baik jika mereka telah mengetahui seluk-beluknya. Ranah domestik yang menjadi wilayah kekuasaan mereka telah menjadi pertimbangan kuat bagi mereka untuk memilih wilayah yang sama ketika mereka bekerja sebagai TKW. Apalagi mereka mendapat upah yang banyak (menurut pendapat mereka).

Tetapi, perasaan “mirip” antara pekerjaan di rumah dan di tempat kerja mereka, tidak memberi mereka kebebasan, melainkan membawa mereka masuk dalam neokolonialisme. Mereka mengalami penjajahan atau kolonialisme dalam bentuk yang tidak jauh berbeda dengan apa yang mereka alami di rumah. Tidak terhitung berapa banyak kasus penganiayaan fisik dan seksual yang dialami oleh para TKW, yang pada akhirnya membuat mereka menderita lebih parah.

Hal ini diperparah ketika mereka kembali ke kampung halaman mereka, dengan membawa sejumlah uang tidak membuat mereka “dianggap” dalam masyarakat. Perbedaan perlakuan tetap terjadi, diskriminasi tetap ada. Laki-laki yang pulang bekerja dari luar negeri (TKI) dengan membawa pulang uang dan membangun rumah dari hasil kerja kerasnya dianggap sebagai laki-laki yang sukses. Sementara, perempuan yang menjadi TKW, membangun rumah dari hasil kerjanya malah dianggap sebagai perempuan “tidak baik.” Mereka dilihat sebagai perempuan yang rela melanggar adat istiadat demi mendapatkan uang.

Hasil yang dibawanya dari luar negeri, tidak pernah dinikmatinya. Karena ia harus memberikan kepada ayahnya atau suaminya

untuk diatur bagi kelangsungan hidup keluarga. Delfi Kause, yang pada awalnya bekerja untuk mengumpulkan uang kuliah, malah harus rela uangnya dipakai untuk membangun rumah dan membiayai kehidupannya sehari-hari.

Hal yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh Sofia Tino, uang Rp. 45.000.000.- hasil jerih payahnya di Malaysia harus dipakai untuk menghidupi keluarga, dan ia sendiri tidak memperoleh apa-apa dari hasilnya. Dari beberapa nara sumber yang saya temui, terlihat bahwa walaupun mereka telah berupaya untuk mencari nafkah, tetapi laki-laki (entah itu suami atau ayah) tetap menjadi penguasa atas mereka. Intervensi dalam pemakaian keuangan hasil keringat mereka merupakan bukti nyata ketidakmampuan mereka untuk keluar dari penguasaan laki-laki. Keinginan mereka untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi ataupun memperbaiki kehidupan mereka sendiri tidak dapat terwujud, dikalahkan oleh berbagai kepentingan keluarga.

Abanat, yang sejak awal menginginkan keluar dari intervensi laki-laki dengan menjadi TKW, pada akhirnya harus menyerah. Intervensi ayahnya terhadap hasil kerjanya tidak terhindarkan. Sampai disini, baik Yustina maupun rekan-rekan lainnya tetap tidak mampu keluar dari kekuasaan laki-laki.

Kenyataan-kenyataan yang telah disampaikan di atas, menunjukkan bahwa pengalaman ketertindasan yang dialami oleh perempuan harus diperhatikan dan inilah yang menjadi salah satu perhatian utama dari studi poskolonial. Poskolonial tidak saja berkaitan dengan hal politik tetapi juga meliputi keadaan kultural dan ekonomi saat ini yang dianggap sebagai kelanjutan dari situasi kolonialisme, yang sekarang mengalami dekolonialisasi namun dalam kenyataannya

kolonialisme gaya baru masih tetap berlanjut (neokolonialisme) (Setyawan, 2010).

Studi feminis poskolonial ini akan sangat efektif dilakukan bagi perempuan eks-buruh migran di desa Tetaf untuk menolong adanya penyadaran dari posisi mereka dan dengan konseling lintas budaya sebagai bentuk konseling yang akan menjadi alat utama (*main tool*) untuk menjembatani perbedaan pemahaman budaya patriarki dalam masyarakat dan upaya untuk meminimalisir stigmatisasi buruk pada para perempuan eks buruh migran dan menciptakan berbagai bentuk pemberdayaan bagi mereka.

Dengan melihat latar belakang di atas, penulis mengasah kepekaan terhadap konteks dan melihat bagaimana dalam budaya Timor terdapat aspek-aspek kolonialisasi yang perlu diwaspadai dan didekonstruksi dengan bantuan konseling lintas budaya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah: 1). Mengetahui konteks penindasan dalam budaya patriarki perempuan Timor, 2). Mengetahui upaya yang dilakukan oleh perempuan Timor untuk mengatasi penindasan budaya patriarki, 3). Merancang upaya Konseling Lintas Budaya (*cross-culture counseling*) dalam menjembatani pemahaman yang berbeda antara perempuan Timor (eks-TKW) dan masyarakat setempat.

KAJIAN PUSTAKA

Konseling Lintas Budaya

Konsep mengenai konseling lintas budaya cenderung akan menekankan unsur budaya dan kebudayaan yang meliputi tradisi, kebiasaan, nilai-nilai, norma, bahasa, keyakinan yang telah terpolakan dalam suatu masyarakat dan diwariskan turun temurun (Agung, 2013). Konsep ini pula yang kemudian memberikan definisi-definisi awal mengenai konseling lintas budaya.

Munculnya konseling lintas budaya tidak terlepas dari kaitannya dengan

perkembangan psikologi dan tradisinya, bahkan kedudukan konseling sebagai suatu ilmu bersumber dari psikologi. Dalam dunia psikologi, lintas budaya dipandang sebagai “kekuatan” keempat setelah aliran psikodinamika, behavioristik, dan humanistik. Lintas budaya dipandang sebagai aliran baru yang mampu mengangkat kearifan lokal suatu masyarakat.

Konseling lintas budaya (*cross culture counseling*) mengandung pengertian hubungan yang terjadi dalam proses konseling yang melibatkan konselor dan konseli yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dan karena itu proses konseling sangat rawan oleh terjadinya bias-bias budaya pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif. Menurut Agung (2013) agar berjalan efektif, maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya, dan memiliki keterampilan-keterampilan yang responsif secara cultural. Dengan demikian, maka konseling dipandang sebagai “perjumpaan budaya” (*cultural encounter*) antara konselor dan klien.

Burn (1992) dalam Supriadi (2001), menjelaskan bahwa *cross cultural counseling is the process of counseling individuals who are of different culture/cultures than that of the therapist*. Oleh sebab itu menurutnya sensitivitas konselor terhadap budaya konseli menjadi sangat penting. Lebih lanjut dijelaskan bahwa *It is important for counselors to be sensitive to and considerate of a client's cultural makeup. Clinicians encounter many challenging and complex issues when attempting to provide accessible, effective, respectful and culturally affirming chemical dependency treatment to a multi-cultural population of Deaf and hard of hearing individuals*.

Perbedaan budaya bisa terjadi pada ras atau etnik yang sama ataupun berbeda. Oleh

sebab itu definisi konseling lintas budaya yang dapat dijadikan rujukan adalah sebagai berikut. Konseling lintas budaya adalah hubungan konseling yang melibatkan para peserta yang berbeda etnik atau kelompok-kelompok minoritas; atau hubungan konseling yang melibatkan konselor dan konseli yang secara rasial dan etnik sama, tetapi memiliki perbedaan budaya yang dikarenakan variabel-variabel lain seperti seks, orientasi seksual, faktor sosio-ekonomik, dan usia (Atkinson, Morten, dan Sue, 1989 dalam Supriadi, 2001).

Berdasarkan latar belakang konsep dan beberapa definisi, dapat disimpulkan konseling lintas budaya adalah pendekatan holistik dalam membantu dan menyembuhkan individu ataupun kelompok dengan menggunakan sudut pandang latar belakang budaya individu atau kelompok tersebut.

Poskolonial

Sejak kemunculan studi poskolonial, telah terjadi perdebatan mengenai prefix “*post*” dalam kata poskolonial. Chow sebagaimana dikutip oleh Sugirtharajah mengartikan prefix *post* dari kata *postcolonial* sebagai *having gone through, after and notion of time which is not linear but constant, marked by events that may be technically finished but that can only be fully understood with the consideration of the devastation they left behind* (poskolonial sebagai yang sudah berlalu dan dalam hubungannya dengan waktu yang tidak linear tapi konstan, waktu ini ditandai dengan peristiwa-peristiwa yang secara teknis sudah berakhir, tapi hanya dapat dimengerti dengan sisa-sisa peristiwa yang ditinggalkan, yang memiliki pengaruh). (Sugirtharajah, 1999). Disini, poskolonial ditempatkan dalam kepekaan terhadap berbagai topik wacana resistensi yang coba ditulis kembali dan berupaya untuk melawan asumsi, representasi, dan ideologi kolonial.

Kolonialisasi juga dapat diartikan sebagai upaya penjajahan dalam bidang

ekonomi, yang struktur perekonomian daerah koloni dirombak demi kepentingan negara induk. Daerah-daerah koloni dipaksa untuk mengkonsumsi produk-produk negara induk. Dalam kolonialisasi jenis ini, kemampuan manusia dan sumber daya alam dari daerah koloni dialirkan untuk keuntungan negara induk (Sianipar, 2004).

Harus disadari, bahwa poskolonial lahir dari konteks negara-negara dunia ketiga yang mengalami penjajahan sebagai sebuah pengalaman kolektif. Realita yang dialami oleh negara-negara dunia ketiga dapat dirangkum dalam beberapa hal, yaitu: *pertama*, adanya realitas berkelanjutan dimana terdapat kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar orang dan kemewahan yang dinikmati hanya oleh segelintir orang. *Kedua*, adanya kontrol ekonomi yang berkelanjutan dan hegemoni imperial yang dialami oleh negara-negara dunia ketiga. *Ketiga*, dikeluarkannya negara-negara dunia ketiga dari berbagai proses pengambilan keputusan penting dalam masyarakat. *Keempat*, terjadi militerisasi tidak hanya dalam kehidupan politik, tetapi juga sebagai cara hidup dan *kelima*, adanya persaingan ideologi (Setyawan, 2010).

Melihat kenyataan bahwa kolonialisasi terjadi tidak saja lewat penjajahan teritori, tetapi telah menyebar ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat secara luas, baik itu sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, keagamaan dan literatur. Konteks ini mendorong kehadiran para penulis untuk melakukan perlawanan melalui tulisan-tulisan, salah satu yang terkenal sebagai pioner poskolonial adalah Edward Said. Walaupun ia sendiri bukanlah seorang poskolonial, tetapi pemikiran-pemikirannya dianggap sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh para penulis aliran poskolonial (Said, 2010).

Konstruksi Barat (kolonial) terhadap budaya dan identitas orang serta budaya

Timur tidak terlepas dari kepentingan, ideologi dan etnosentrisme Barat. Oleh karena itu, fokus kajian poskolonial adalah masalah ketidakadilan dalam bidang sosial, budaya dan ilmu pengetahuan yang diakibatkan oleh hegemoni, kolonialisme serta narsisme dan kekerasan epistemologi Barat yang sudah berkembang sejak awal abad modern. Dengan perkataan lain, kajian poskolonial “menawarkan” sebuah pemahaman kritis dan berupaya untuk mengungkap berbagai dimensi ideologis, hegemonis, dan imperialis yang terdapat dalam ilmu sosial-budaya.

Said (2010) sendiri mengartikannya sebagai melihat poskolonial sebagai sebuah “*contrapuntal reading*.” Poskolonial adalah sebuah strategi pembacaan untuk mendorong adanya pembelajaran bersama yang didasarkan pada pengalaman yang dieksploitasi (*the exploited*) dan yang mengeksploitasi (*the exploiter*). Pembacaan *contrapuntal* membuka jalan untuk sebuah situasi dimana adanya situasi yang melebihi karakter biner dalam tulisan-tulisan Timur dan Barat.

Alva dalam Loomba (2003) mengemukakan bahwa poskolonial merupakan suatu subjektivitas dari perlawanan terhadap wacana-wacana dan praktek imperialisasi/kolonialisasi (subordinasi/subjektivikasi). Samia Mehrez dalam Sugirtharajah (2003), mendefinisikan poskolonial sebagai *an act of exorcism for both the colonized and the colonizer*. Bagi keduanya harus ada proses pembebasan, dari ketergantungan. Bagi yang terjajah pembebasan dari ketergantungan dan ketidakadilan dalam keterwakilan dan kelembagaan. Bagi yang menjajah mereka terbebaskan dari imperialisme dan pandangan rasis. Menurut Sianipar (2004), poskolonial dapat diartikan sebagai perlawanan terhadap dominasi kolonial dan warisan-warisannya yang tetap ada saat ini, baik yang dilakukan

oleh negara asing atau pun yang dilakukan oleh negara sendiri.

Poskolonial bukanlah sebuah *major study* tapi lebih sebagai sebuah *creative literature* dan juga sebagai sebuah diskursus perlawanan yang muncul oleh karena penjajahan Barat. Oleh karena itu studi poskolonial memiliki dua aspek, yaitu, *pertama*, untuk menganalisa berbagai strategi yang digunakan oleh kolonial untuk membangun *imagenya*. *Kedua*, mempelajari bagaimana “yang terjajah” menggunakan strategi-strategi dari penjajah untuk membangun identitas, keberadaan diri dan pemberdayaan mereka sendiri (Sugirtharajah, 2002).

Pada akhirnya, poskolonial tidak dapat dibatasi pengertiannya pada suatu masa atau waktu saja, tetapi harus dilihat dalam pengertian yang lebih luas, yang dipahami sebagai sebuah studi kritis yang melihat adanya indikasi penindasan atau kolonialisasi yang terjadi dalam suatu masyarakat, yang mendorong masyarakat untuk bersuara menuju adanya sebuah pembebasan dan pemberdayaan.

Dengan melihat indikasi-indikasi penjajahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan berupaya mendorong adanya pembebasan, maka bagi Sugirtharajah (2002), poskolonial secara positif menandakan adanya tiga hal, yaitu: **Pertama**, keterwakilan atau representasi (*representation*). Poskolonial melibatkan mereka yang dijajah “*the others*.” Mereka menuntut untuk mengambil kembali tempat mereka dalam sejarah. Mereka hadir dalam pusat metropolitan sebagai partner atau rekan yang penuh percaya diri, gigih dan dapat diandalkan untuk bekerja sama dan berdialog dengan mereka yang dirampas dan tidak diuntungkan di dunia Barat. Kehadiran mereka yang terjajah mengindikasikan adanya hal yang berbeda, dengan menurunkan dan melewati batas-batas yang telah dibangun

selama ini, yang telah menjadi penghalang antara dunia Timur dan Barat, maka akan tercipta sebuah ikatan yang membebaskan “dunia ketiga” dari status marginal yang telah disandanginya selama ini.

Kedua, identitas (*identity*). Berkaitan dengan keterwakilan yang diperoleh “yang lain,” yang akan membebaskan mereka dari status marginalnya, maka poskolonial juga berkaitan dengan memperoleh identitas baru. Kehadiran kolonialisme telah mendorong pencampur-bauran masyarakat dengan budaya, yang menghasilkan identitas hibrid (*hybridized identity*). Hibriditas adalah sebuah negosiasi dan interaksi budaya yang lebih luas dan kompleks, yang timbul karena adanya penyesuaian antara nilai-nilai lokal dengan yang dari luar.

Ketiga, sikap dalam membaca (*posture reading*). Poskolonial juga harus dilihat sebagai sebuah usaha kritis yang bertujuan untuk membuka adanya hubungan antara gagasan-gagasan dan kekuasaan yang terletak dibalik teks-teks, teori, dan pembelajaran Barat. Poskolonial merupakan sebuah cara interogasi aktif yang menolong untuk melihat adanya sistem hegemoni dalam pemikiran, teks-teks tertulis, dan praktek simbolik yang dibangun dan didominasi oleh Barat. Poskolonial merupakan sebuah wacana perlawanan terhadap imperialisme, ideologi dan perilaku penjajah yang muncul dalam cara-cara yang lebih beragam dan lebih luas. Entah itu dalam bidang politik, ekonomi, sejarah, bahkan dalam studi teologi dan biblika.

Konseling Lintas Budaya dan Poskolonial

Dalam kaitannya dengan bimbingan konseling, pendekatan budaya ini sangat tepat karena sesuai dengan keadaan lingkungan Nusa Tenggara Timur khususnya Timur Tengah Selatan yang berbudaya plural. Landasan Bhineka Tunggal Ika yaitu kesamaan di atas keragaman merupakan

landasan dalam mewujudkan konseling lintas budaya.

Poskolonial merupakan sebuah gerbang baru dalam memberikan pemahaman mengenai budaya melalui proses konseling. Poskolonial yang multidisipiner menekankan kesejajaran dalam tatanan kehidupan masyarakat atau dengan kata lain budaya patriakal harus dihilangkan. Laki-laki dan perempuan harus sejajar dan seimbang, tidak ada penindasan yang terjadi baik penindasan secara fisik, psikis dan spiritual.

Pemahaman mengenai konseling lintas budaya adalah pada pengakuan terhadap pluralisme budaya, ciri-ciri, dan dinamikanya yang mampu menolong seorang konselor untuk dapat memfasilitasi proses konseling. Hal ini senada dengan konsep poskolonial yakni membebaskan masyarakat dari paham mengenai status marginal sekaligus merupakan usaha untuk membuka wacana baru terhadap perlawanan imperialisme.

Konseling adalah ilmu terapan, dimana berusaha menggunakan prinsip-prinsip keilmuan untuk melakukan intervensi dalam rangka membantu individu ataupun kelompok yang dilayaninya. Agung (2013) menyatakan bahwa selama sepuluh tahun, konseling tidak punya kepedulian yang cukup terhadap aspek-aspek budaya dalam melakukan prakteknya. Asumsi yang melatarbelakangi kecenderungan tersebut adalah bahwa individu adalah individu, dan yang penting adalah individu pada situasi konseling, sehingga konseling tidak ada kaitannya dengan budaya. Cara pandang ini tentunya memberikan kelemahan karena hanya membatasi diri pada aspek-aspek mikro dari konseling, kenyataannya bahwa efektivitas proses konseling sangat ditentukan oleh latar belakang budaya klien yang sangat beragam, khususnya dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia. Masuknya paham poskolonial dalam konseling lintas budaya diharapkan mampu

menghilangkan ketidaksejajaran dan ketidakseimbangan yang masih sering terjadi dalam praktik konseling. Studi feminis poskolonial ini akan sangat efektif dilakukan bagi perempuan eks-buruh migran di desa Tetaf untuk menolong adanya kesadaran dari posisi mereka dan dengan konseling lintas budaya sebagai bentuk konseling yang akan menjadi alat utama (*main tool*) untuk menjembatani perbedaan pemahaman budaya patriarki dalam masyarakat dan upaya untuk meminimalisir stigmatisasi buruk pada para perempuan eks buruh migran dan menciptakan berbagai bentuk pemberdayaan bagi mereka.

METODE PENELITIAN

Fenomenologi

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang berbentuk studi fenomenologis bersifat deskriptis-analistis, sebuah metode yang menekankan pada *verstehen* yaitu memberikan pemaknaan interpretatif terhadap pemahaman seseorang dalam memahami apa sebenarnya pemahaman budaya patriarkal pada perempuan eks-TKW, karena itu perspektif ini menekankan pada aspek subyektif individu (Moleong, 2002).

Peneliti berusaha untuk mendengarkan secara seksama jawaban responden dan selanjutnya menterjemahkan pengalamannya secara akurat agar terhindar dari bias. Untuk menghindari bias ini, peneliti akan melakukan verifikasi.

Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian kualitatif ini adalah individu, sering disebut dengan responden (Creswell, 1998). Responden adalah individu yang menyediakan informasi. Responden dipilih dengan menggunakan prosedur *purposive sampling* yaitu, metode yang digunakan untuk memperoleh subyek yang kredibel, sesuai

dengan kriteria yang telah ditentukan (Strauss & Corbin, 1990), dan untuk menambah jumlah responden dapat digunakan teknik *snowball sampling* yaitu suatu metode untuk menambah responden dengan meminta kepada responden yang telah diwawancarai ataupun pihak lain yang terkait untuk merekomendasikan calon responden berikutnya (Groenwald, 2004).

Seleksi responden dilakukan dengan memilih dan mempelajari sample, dengan criteria, yaitu: 1). Perempuan yang dijadikan responden penelitian adalah mereka yang telah mengalami fenomena yang menjadi fokus penelitian yaitu: a). Perempuan eks TKW, b). Usia antara 17-22 tahun. Subyek diambil dalam rentang usia tersebut karena ditinjau dari tahap perkembangan manusia, usia di atas termasuk usia produktif dalam bekerja (Santrock, 2002) dan secara hukum sudah memperoleh izin menjadi seorang TKW, dan c). Pendidikan: Sekolah Menengah Pertama (SMP), 2). Tertarik untuk berpartisipasi memahami latar belakang dan makna dari fenomena tersebut, 3). Bersedia untuk berpartisipasi dalam proses wawancara dan bersedia menandatangani *informed consent* atau pernyataan kesediaan menjadi responden penelitian, dan 4). Mengizinkan peneliti untuk merekam data dan mempresentasikan data yang diperoleh dalam laporan penelitian.

Responden penelitian adalah: 1). Perempuan Eks-TKW, 2). Keluarga (orang tua dan saudara) yang sering berinteraksi dengan subjek, 3). Kepala Desa, dan 4). Tokoh Agama.

Proses Penelitian Fenomenologi

Untuk mendapatkan deskripsi terhadap data yang diperoleh sehingga mencapai pemahaman terhadap arti dan esensi dari suatu pengalaman maka dibutuhkan beberapa metode pendukung sebagai berikut yaitu *epoche*, *phenomenological reduction*,

imaginative variation, dan syntesis of meaning and essence (Moustakas, 1994).

Teknis Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah penelitian modifikasi metode Stevick-Colaizzi-Keen dari Moustakas (1994). Prosedur analisis dan interpretasi data ini meliputi: 1). Dimulai dengan membuat transkrip wawancara berdasarkan hasil wawancara responden, terkait dengan pengalaman perempuan eks-TKW dalam memahami budaya patriakal, 2). Memahami dan mencari pernyataan dalam wawancara yang dapat menggambarkan pengembangan karier sebagai topik (*phenomenon*) yang menjadi kajian atau fokus penelitian ini, 3). Melakukan *bracketing* dengan menggolongkan fokus penelitian ke dalam *bracket* sehingga menghasilkan hal-hal lain dan seluruh proses penelitian bersumber dari pernyataan responden, 4). Melakukan *horizontalization* dengan mendaftar pernyataan responden dan memperlakukan pernyataan dengan seimbang sesuai dengan asumsi bahwa setiap pernyataan memiliki nilai yang sama. Mengembangkan daftar pernyataan yang tidak berulang dan tidak tumpah tindih, 5). *Cluster of meaning*, dimana pernyataan dikelompokkan dalam unit-unit makna (*meaning units*) membuat daftar unit-unit makna yang teridentifikasi, menulis deskripsi unit-unit makna tersebut yang menggambarkan pengalaman yang dialami responden, dan 6). Merefleksikan unit-unit makna yang terbentuk berdasarkan deskripsinya, menggunakan *imaginative variation* atau deskripsi struktural, mencari semua makna yang memungkinkan menggunakan perspektif divergen untuk memperkaya pemahaman tentang *phenomenon* yang dialami oleh responden dalam memaknai pekerjaannya.

Prosedur Pelaksanaan

Ada 8 cara dalam kaitan dengan prosedur pelaksanaan penelitian, yaitu: 1). Mengadakan pemilihan responden yang didasarkan pada kriteria dan pertimbangan yang sudah ditentukan sebelumnya, 2). Mencatat alamat rumah atau alamat yang bisa didatangi, telepon yang bisa dihubungi untuk konfirmasi wawancara, 3). Memperkenalkan diri pada responden. Peneliti akan memperkenalkan diri secara jelas mengenai maksud dan tujuan dari pembicaraan. Perkenalan ini dilakukan supaya responden mengetahui maksud dan tujuan peneliti, 4). Mengadakan survei melalui wawancara mendalam secara langsung ke beberapa perempuan yang memiliki relevansi dengan konteks penelitian. Ini dijadikan sebagai data primer untuk menambah pemahaman terhadap analisis dan penarikan kesimpulan terhadap konteks penelitian, 5). Mengadakan diskusi dengan para responden (perempuan eks TKW) dalam rangka memperoleh masukan mengenai pemahaman terhadap budaya patriakal, 6). Mengumpulkan data sekunder, merupakan data secara statistik. Peneliti sebagai instrument utama dalam penelitian. Selama proses pengumpulan data, peneliti menggunakan *tape recorder*, hal ini dimaksudkan untuk menjaga keakuratan data, 7). Mengadakan pencatatan terhadap hasil sementara yang didapatkan, dan 8). Menuliskan laporan hasil penelitian.

Teknik Verifikasi

Peneliti perlu melakukan upaya validasi kembali kepada responden untuk mengevaluasi apakah ada pernyataan-pernyataan penting dari responden yang tidak teridentifikasi dalam tema yang ada. Langkah pertama yang dilakukan untuk verifikasi data adalah dengan membagikan salinan deskripsi secara tekstural-struktural dari pengalaman responden (Humphrey dalam Moustakas, 1994). Kemudian tiap responden diminta

untuk secara hati-hati memeriksa deskripsi tersebut, mereka dapat memberikan tambahan masukan dan pembetulan. Langkah terakhir, peneliti merevisi kembali pernyataan sintesisnya. Proses ini disebut *intersubjective validity*, yaitu menguji kembali (*testing out*) pemahaman peneliti dengan pemahaman responden melalui interaksi sosial yang timbal balik (*back-and-forth*) (Creswell, 1998).

Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian, dipilih desa Tetaf, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan pertimbangan bahwa di desa tersebut fenomena yang ingin diteliti sedang berkembang dan menjadi sorotan masyarakat setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara Individual

DK (subjek 1)

Keinginannya untuk menjadi TKW adalah mendapatkan uang untuk kuliah. Ia bekerja sebagai pegawai toko di Malaysia selama 3,5 tahun. Selama ia bekerja, ia mengirimkan uang bagi kedua orang tuanya untuk membangun rumah dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena ayahnya hanya seorang petani. Selama ia bekerja, ia tidak mendapatkan penyiksaan fisik, hanya beberapa kali dimarahi dan pernah dituduh mencuri uang majikan. Setelah kembali ke Tetaf, ia hanya membantu ibunya untuk mengurus adik-adiknya dan keinginannya untuk kuliah tidak terlaksana karena uangnya telah habis untuk membantu kebutuhan hidup sehari-hari.

YA (subjek 2)

Keinginannya untuk menjadi TKW karena ingin keluar dari lingkungannya, yang dianggap tidak memberikan tempat bagi kehadiran seorang perempuan. Baginya dengan menjadi TKW dan memperoleh uang maka ia dapat memutuskan apa yang baik

bagi dirinya, namun hal tersebut tidak terlaksana ketika ia kembali ke Tetaf.

NK (Subjek 3)

Menjadi TKW karena mengikuti suami yang sudah terlebih dahulu pergi ke Malaysia untuk bekerja. Di Malaysia, NK tidak diizinkan untuk bekerja oleh suami karena suaminya tidak menginginkan NK mengalami perlakuan yang kasar dari majikan. Selama menjadi TKW, NK hanya mengurus anak di rumah dan juga terlibat pelayanan digereja. NK memperoleh uang untuk menambah kebutuhan rumah tangga melalui pelayan digereja. Uang yang dikumpulkan NK bersama suami dipakai untuk membiayai pernikahan adat mereka sekembalinya ke Tetaf.

Significant Other

Significant Other Pertama

Significant other pertama adalah seorang tokoh agama (Pendeta) yang mengalami langsung fenomena TKW di desa Tetaf. Menurut *significant other*, fenomena TKW di desa Tetaf sudah berlangsung sejak lama, sekitar tahun 1970an dan semakin marak berkembang pada tahun 1990an. Meningkatnya keinginan untuk menjadi TKW dilatarbelakangi oleh berbagai cerita yang diperoleh subjek mengenai kesuksesan teman ataupun saudara yang telah terlebih dahulu menjadi TKW, sekalipun mungkin cerita kesuksesan tersebut semu belaka. Pembantu rumah tangga merupakan pekerjaan utama dari mereka sebagai TKW. Persoalan ekonomi merupakan alasan utama mereka keluar dari desa dan menjadi seorang TKW. Menurut *significant other*, hampir sebagian besar perempuan yang pergi untuk menjadi TKW tidak mengikuti prosedur yang baik atau pergi secara ilegal. Hal ini memberi dampak pada keberadaan mereka disana yang hampir sebagian besar tidak sukses ketika

menjadi TKW dan akhirnya memilih untuk kembali ke desa Tetaf.

Menurut *significant other*, fenomena TKW yang sudah terjadi sejak lama di desa Tetaf ini juga dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat setempat yakni budaya patriarki yang masih sangat kental. Dalam konstruksi budaya orang *atoin meto*, perempuan berada di ranah domestik bukan ranah publik. Menjadi TKW juga bisa dikatakan sebagai akumulasi dari pemberontakan terhadap budaya yang ada, “dari pada saya di rumah, dengan pembagian kerja yang kaku, lebih baik saya memilih meninggalkan kampung halaman, keluar dari kungkungan budaya”.

Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan perempuan di desa Tetaf sulit “keluar” dari kungkungan budaya patriarki. Menurut *significant other* pikiran kaum perempuan Timor sudah teroktasi dalam satu pemahaman bahwa pendidikan tidaklah penting, karena ketika mengikuti pendidikan pasti akan terputus atau tidak selesai. Permasalahannya adalah orientasi pendidikan dan tidak adanya kesadaran orang tua. Orientasi pendidikan di Indonesia ini hanya untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil bukan untuk menjadi pintar dan pandai, faktanya orang tua menjadi frustrasi karena berpikir bahwa sia-sia saja menyekolahkan anak tetapi dikemudian hari menganggur. Pendidikan sangatlah penting sehingga *mind set* perempuan Timor mengalami pencerahan sehingga mampu melihat nilai-nilai budaya apa saja yang tidak membebaskan dan nilai-nilai budaya yang menghargai posisi perempuan.

Gereja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Tetaf pun turut memberikan bantuan dan solusi terhadap permasalahan TKW. Salah satu solusi yang diberikan adalah dengan melakukan pemberdayaan ekonomi jemaat. Gereja juga mencoba memutuskan mata rantai pengiriman TKW secara ilegal melalui kerja sama

dengan PDTKW/PDTKI. Gereja juga bekerja sama dengan pemerintah melakukan pendampingan dan penyadaran terus-menerus bahwa perempuan dan laki-laki punya hak yang sama untuk mengenyam pendidikan.

Significant Other Kedua

Significant Other kedua adalah Kepala Desa Tetaf yang mengalami langsung fenomena TKW di desa Tetaf. Menurut *significant other*, sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa, fenomena TKW di desa Tetaf sudah terjadi. Fenomena TKW sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa terjadi secara ilegal. Banyak sekali perempuan dan anak-anak gadis yang dipengaruhi dan kemudian diberangkatkan menjadi TKW tanpa persetujuan orang tua bahkan tanpa sepengetahuan orang tua. Sebagian besar yang menjadi TKW secara ilegal mengalami banyak permasalahan, mendapatkan kekerasan dari majikan dan tidak bertahan lama, mereka kemudian kembali ke Tetaf dengan tidak membawa hasil atau tidak sukses.

Menurut *significant other*, budaya Timor yakni budaya patriarki juga memberikan sumbangsih bagi perempuan Timor untuk menjadi TKW. Menurut *significant other*, budaya suku Timor ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki adalah menyambung marga, mempunyai kuasa untuk mengatur tanah dan hewan sedangkan perempuan hanya memasak, mencuci piring. Sehingga, perempuan keluar dan pergi menjadi TKW karena tekanan, bukan saja ekonomi tapi juga budaya itu sudah diwariskan. Perempuan Timor dipandang tidak berharga secara budaya, secara budaya namanya hilang artinya tidak mendapatkan hak ataupun warisan.

Menurut *Significant other* meningkatnya fenomena TKW disebabkan karena banyak perempuan Timor yang tidak mengenyam pendidikan secara baik, hal ini

juga disebabkan karena jumlah anak dalam sebuah keluarga sangat banyak dan yang lebih diprioritaskan adalah anak laki-laki.

Sebagai pemerintah desa, *significant other* melakukan beberapa program desa yang bertujuan untuk menekan jumlah TKW dan mengangkat derajat perempuan Timor, salah satunya adalah Desa Siaga. Program Desa siaga memfokuskan perhatian kepada permasalahan perempuan yang “dijajah” oleh laki-laki karena budaya. Salah satu kegiatan dari program desa siaga adalah para suami diharuskan memberikan perhatian khusus terhadap istri yang sedang mengandung.

Program desa siaga ini berhasil karena selain perempuan diperhatikan, pengiriman TKW yang semula dilakukan secara ilegal menjadi legal dan berjalan sesuai dengan prosedur yang jelas, bahkan bagi perempuan yang akan menjadi TKW dibekali dengan pelatihan-pelatihan.

Significant Other Ketiga

Significant other ketiga adalah seorang TKI. Ia bekerja di Malaysia dengan membawa serta istri dan anaknya. Selama bekerja disana, ia tidak mengizinkan istrinya untuk bekerja (sebagai pembantu rumah tangga atau bekerja di toko) karena baginya dalam budaya Timor seorang perempuan tidak diperbolehkan bekerja di luar rumah. Istrinya hanya menuruti keinginan suaminya karena budaya yang telah mengikat dan rasa hormat terhadap suaminya. Sekembalinya ke Tetaf, *significant other* menggunakan uangnya untuk menikah secara adat dengan istrinya, membangun rumah dan mengelola sawah.

Secara Umum Melalui Observasi

Beberapa temuan yang diperoleh secara umum melalui observasi yakni: 1). Pola pikir masyarakat Tetaf, khususnya perempuan yang belum berubah. Bagi mereka menjadi TKW adalah pekerjaan yang sangat

mudah dan *instant* untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya. Bagi mereka, di Tetaf tidak ada pekerjaan yang mampu memberikan mereka penghasilan yang besar dalam jangka waktu yang singkat. Pola pikir seperti ini yang membuat mereka berlomba-lomba agar dapat keluar dari Tetaf dan menjadi TKW sekalipun tidak dibekali dengan keterampilan yang baik, 2). Tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini yang membuat perempuan di Tetaf tidak mampu berpikir dan bertindak secara bijak. Rendahnya tingkat pendidikan membuat perempuan Tetaf tidak memiliki keterampilan ketika menjadi TKW maupun ketika kembali ke Tetaf. Ketika menjadi TKW, mereka sering di marahi dan mendapat perlakuan kasar dari majikan dan ketika kembali, mereka tidak mampu mengembangkan diri dan kembali melakoni posisi awal yakni mengurus rumah dan anak, 3). Lingkungan masyarakat. Pola kehidupan masyarakat Timor yang kental dengan budaya patriarkhi. Perempuan selalu menjadi nomor dua bahkan dipandang tidak memiliki harga. Pengaruh dari budaya ini juga mempengaruhi pola pikir dan cara pandang perempuan terhadap dirinya sendiri. Perempuan merasa rendah dan tidak ada keinginan dari dalam diri untuk “keluar dari ketertindasan budaya.

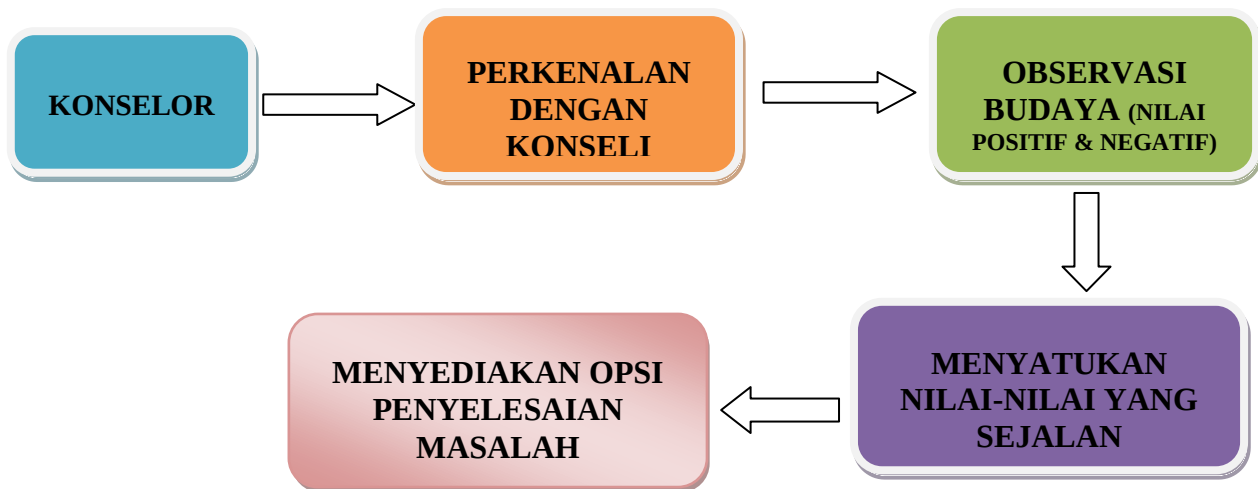
Model Konseling Lintas Budaya

Model konseling lintas budaya yang ditawarkan berdasarkan masalah yang dihadapi oleh perempuan eks-TKW di Desa Tetaf dibuat dalam dua jenis pendekatan, yaitu, 1). Pendekatan umum: melakukan sosialisasi bagi masyarakat secara umum berkaitan dengan nilai budaya patriarkhi dan penghormatan kepada perempuan sebagai subyek yang sama dengan laki-laki. Metode: ceramah dan diskusi kelompok, dan 2). Pendekatan khusus adalah pendekatan yang dilakukan langsung kepada perempuan eks-TKW untuk mengetahui masalah yang dihadapi dan diupayakan penyelesaiannya

secara bersama-sama. Langkah-langkahnya yang akan dicapai sesuai dengan model yang

dirancang agar menjawab rumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Model Konseling Lintas Budaya



Sumber: Output penelitian

Penjelasan langkah-langkah, sebagai berikut: 1). Dalam langkah pertama, konselor harus menyadari bahwa dirinyalah yang menjadi motor penggerak proses konseling ini. Konselor harus menyadari bahwa latar belakang budaya yang dimilikinya berbeda dengan budaya konseli dan perbedaan ini harus dilihat sebagai tantangan yang dapat diubah menjadi potensi untuk penyelesaian masalah, 2). Perkenalan dengan konseli dimaksudkan untuk membangun hubungan dan kepercayaan terlebih dahulu, sebelum proses konseling benar-benar terjadi. Dalam perkenalan ini tentu akan melibatkan budaya masing-masing pihak, hal ini dikarenakan dalam budaya Nusa Tenggara Timur, setiap budaya memiliki ciri khas dalam proses perkenalan. Disini, konselor harus berupaya untuk belajar dan menerima budaya konseli dan juga sebaliknya. Proses membangun hubungan dan kepercayaan ini, bukanlah proses yang singkat. Ini tergantung pada kemampuan konselor dan konseli. Tahapan perkenalan ini akan menentukan jalan atau tidaknya proses konseling selanjutnya, 3). Observasi. Langkah ini ditentukan oleh

konselor untuk mencari tahu detail-detail berdasarkan latar belakang budaya konseli. Karena, kasus ini dihadapi oleh perempuan eks-TKW di Desa Tetaf yang berlatar belakang budaya Timor, maka konselor dapat melakukan pengamatan berkaitan dengan hal-hal di bawah ini: a). Mengapa perempuan di Tetaf tidak boleh bekerja di *public area*?, b). Apa pandangan masyarakat desa berkaitan dengan pekerjaan perempuan sebagai TKW di luar negeri?, c). Siapa yang mengelolah pendapatan yang diperoleh perempuan eks-TKW?, dan d). Nilai-nilai budaya apa sajakah yang kuat mengikat di dalam tradisi Timor? Dengan memiliki pemahaman awal yang baik berdasarkan hasil observasi ini, maka diharapkan konselor mampu untuk melihat posisi perempuan dan perempuan dapat mengetahui nilai positif dan negatif dari budaya, mana yang memiliki potensi membebaskan dan mana yang menindas, 4). Menyatukan nilai-nilai yang sejalan. Setelah observasi dan mendapatkan “modal” mengetahui nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh konseli, maka menjadi tugas konselor untuk memilah nilai-nilai budaya mana

sajakah yang memiliki pengaruh kuat berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh konseli. Setelah memilah maka konselor dapat melakukan *self-evaluation* untuk melihat dari kacamata budaya konselor sendiri. Ini akan menolong konselor untuk bersikap empati dan juga menghasilkan opsi-opsi penyelesaian masalah yang baik, dan 5). Menyediakan opsi penyelesaian masalah. Dalam konseling, yang harus menentukan penyelesaian masalah bukanlah konselor, tetapi konseli itu sendiri. Karena tugas konselor pada akhirnya adalah menyediakan opsi penyelesaian masalah secara obyektif, termasuk menampilkan sisi positif dan negatif dari masing-masing opsi. Kebebasan untuk memilih pada akhirnya ada di tangan konseli untuk menentukan opsi mana yang dipilihnya. Dengan demikian aspek kemandirian dalam diri konseli sangat penting disini, sehingga pada akhirnya ia mampu untuk menjalankan opsi yang dipilihnya.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa isu penindasan perempuan dalam budaya patriarki masyarakat Timor, khususnya di desa Tetaf masih terus terjadi. Hal ini juga yang menjadi alasan bagi beberapa orang perempuan untuk keluar dari desa Tetaf dan menjadi TKW. Pengalaman menjadi TKW memberikan perubahan persepsi bagi perempuan Timor namun hal ini tidak mampu mengubah posisi mereka sebagai “yang kedua” ketika mereka kembali ke desa Tetaf. Budaya patriarki tetap menjadi penjajah bagi mereka, karena sekembalinya mereka ke Tetaf, pendapat mereka tetap dikuasai oleh laki-laki, bahkan impian mereka untuk menggunakan uang tersebut untuk meningkatkan taraf kehidupan menjadi buyar. Adapun model konseling lintas budaya yang dapat ditawarkan adalah: Konselor, pengenalan dengan konseli, observasi budaya (nilai negatif & positif),

menyatukan nilai-nilai yang sejalan, dan menyediakan opsi penyelesaian masalah.

SARAN

Demi mewujudkan rencana penelitian selanjutnya, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan: 1). Perlunya *depth interview* dengan para subyek, karena apa yang disampaikan belum benar-benar mendalam, dan 2). Perlu adanya data yang lebih terperinci mengenai kondisi desa Tetaf agar permasalahan budaya patriarkhi dapat dilihat dengan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiputra, A.A.N. (2013). *Konseling Lintas Budaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Tradition*. London: Thousand Oaks, CA Sage.
- Edward W. & Said, A. M. T. (2004). Politik Informasional dan Krisis Demokrasi. Dalam Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto (Ed.). *Hermeneutika Paskakolonial: Soal Identitas* (hlm. 23-24). Yogyakarta: Kanisius.
- Groenwald. (2004). A Phenomenological research design illustrated. *International Journal of Qualitative Methods*, 3 (1), 1-27.
- Indonesia: Country Gender Assessment. (2006). Southeast Asia Regional Department, Regional and Sustainable Development Department, Asia Development Bank: Manila.
- Loomba, A. (2003). *Kolonialisme/Paskakolonialisme*. Yogyakarta: Bentang Budaya.

- Moleong, L.J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mies, Marla. (1986). *Patriarchy and Accumulation on A World Scale: Women in The International Division of Labour*. London: The Bath Press.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. London. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Setyawan, Y. B. (2010). *Bahan Kuliah Hermeneutik Poskolonial*. Salatiga.
- Sianipar, G. (2004). Mendefinisikan Poskolonialisme. Dalam Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto (Ed.). *Hermeneutika Paskakolonial: Soal Identitas* (hlm.9-11). Yogyakarta: Kanisius.
- Sugirtharajah, R.S. (1999). *Asian Biblical Hermeneutics and Postcolonialism: Contesting The Interpretation*, Sheffield: Sheffield Academy Press.
- Supriadi, D. (2001). *Konseling Lintas-Budaya: Isu-isu dan Relevansinya di Indonesia*. Tulisan ini dipresentasikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Strauss., A. L. & Corbin, J. (1990). *Basic of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Technique*. Newbury Park: Sage Publication, Inc.